

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN BUMDes
(STUDI PADA BUMDes SUPERIN JAYA DESA PULAU
PANJANG CERENTI)**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi*



Oleh :

NAMA : ELKY YUNANDA

NPM : 200411023

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2024**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN BUMDes (STUDI PADA BUMDes SUPERIN JAYA DESA PULAU PANJANG CERENTI).

NAMA : ELKY YUNANDA
NPM : 200411023
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

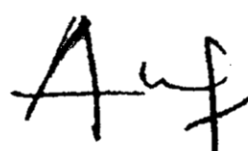
Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PEMBIMBING II



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

TANDA PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari :
Tanggal :
Bulan :
Tahun : 2024

TIM PENGUJI

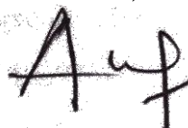
Ketua,



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si

NIDN. 1030058402

Sekretaris,



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si

NIDN. 1005108901

1. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
2. SARJAN.M, S.Sos., M.Si



Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan,



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si

NIDN. 1030058402

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN BUMDes (STUDI PADA BUMDes SUPERIN JAYA DESA PULAU PANJANG CERENTI)

**ELKY YUNANDA
200411023**

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terhadap pengelolaan BUMDes Desa Pulau Panjang Cerenti dan faktor penghambat dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini berasal dari aktor yang ada di BUMDes Desa Pulau Panjang Cerenti. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memiliki 5 indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa Penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan BUMdes Superin Jaya Desa Pulau Panjang Cerenti Belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Tata Kelola, BUMDesa,GCG

ABSTRACT

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN BUMDes (STUDI PADA BUMDes SUPERIN JAYA DESA PULAU PANJANG CERENTI)

ELKY YUNANDA

200411023

The aim of this research is to explain the application of Good Corporate Governance principles to the management of BUMDes in Pulau Panjang Cerenti Village and the inhibiting factors in implementing Good Corporate Governance principles. The research method used in this research is qualitative research with a case study approach. The methods used to collect data are observation, interviews and documentation. The informants for this research came from actors in BUMDes Pulau Panjang Cerenti Village. Data analysis includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research has 5 indicators, namely transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality. Based on the research conducted, it was found that the implementation of Good Corporate Governance in the management of BUMdes Superin Jaya Pulau Panjang Cerenti Village has not been running well.

Keywords: Implementation, Governance, BUMDesa, GCG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUMDes) adalah lembaga ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat lokal. BUMDes memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di desa. Selain itu juga BUMDes berperan pada lembaga sosial yang berpihak dengan kepentingan masyarakat melalui penyediaan pelayanan sosial, sedangkan lembaga bertujuan untuk mencari keuntungan dengan melalau penawaran sumber daya lokal. Dasar hukum untuk BUMDes di Indonesia terutama dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tepatnya pada Pasal 67 hingga Pasal 71 UU Desa mengatur mengenai BUMDes.

BUMDes menurut Kusmayadi (2015:11) harus dilampirkan Peraturan Desa (PERDes) dan Anggaran Dasar yang sejalan dengan lima prinsip yang ditetapkan dalam *good corporate governance* yang dikemukakan oleh *organization economic cooperation and development* (OECD) yaitu keterbukaan informasi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

Meskipun tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur *good corporate governance* dalam BUMDes, prinsip-prinsip *good corporate*

governance seharusnya diinternalisasikan pengelolaan BUMDes sesuai dengan nilai-nilai

yang berlaku di masyarakat. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BUMDes Superin Jaya merupakan lembaga usaha ekonomi desa milik Pemerintah Desa Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. BUMDes Superin Jaya didirikan pada tanggal 13 September 2019 melalui forum musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat Desa Pulau Panjang Cerenti, yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga desa lainnya, dan perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Pada saat ini BUMDes Superin Jaya memiliki usaha yang akan dijalankan yaitu unit usaha fotocopy dan percetakan, serta menyediakan alat tulis kantor dan sekolah. Munculnya ide untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut dilatar belakangi oleh kebutuhan administrasi kantor dan sekolah yang cukup tinggi di Desa Pulau Panjang Cerenti, dimana fotocopy dan percetakan yang ada terletak lumayan jauh dari Desa Pulau Panjang Cerenti. Pada tahap awal usaha, dana untuk biaya investasi sebesar Rp 150.000.000,- yang sudah termasuk biaya upah pekerja didalamnya. Sementara itu keuntungan yang diperoleh dari usaha fotocopy dan percetakan, digunakan untuk pengembangan usaha, dan sebagian sisanya disetorkan ke pemerintah desa sebagai tambahan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Namun berdasarkan observasi awal peneliti diketahui bahwa pengelolaan BUMDes Superin Jaya belum optimal. Adapun fenomena-fenomena yang ditemukan adalah berkaitan dengan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Selama ini BUMDes Superin Jaya tidak transparan dalam pengelolaan BUMDes sehingga menjadi pembicaraan ditengah-tengah masyarakat di Desa Pulau Panjang Cerenti. BUMDes seharusnya memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada anggota, desa, dan pihak terkait lainnya tentang kegiatan, keuangan, dan kinerja bisnisnya. Masalah selanjutnya terdapat pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan BUMDes. Perencanaan BUMDes Superin Jaya didirikan tanpa melibatkan masyarakat sehingga keberadaan BUMDes Superin Jaya kurang bermanfaat bagi masyarakat di Desa Pulau Panjang Cerenti.

Permasalahan diatas tidak sejalan dengan prinsip *good corporate governance* yaitu prinsip keterbukaan informasi (*transparancy*) dan akuntabilitas (*accountability*). Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Akuntabilitas yaitu kejelasan dari fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen organisasi atau perusahaan dengan tujuan pengelolaan organisasi atau perusahaan tersebut berjalan dengan efektif. Hal tersebut juga menimbulkan permasalahan internalnya, seperti yang telah peneliti jelaskan diatas bahwa yang dapat mempengaruhi kemandirian (*independency*) BUMDes itu berasal dari pemerintah desa, termasuk kepala desa beserta perangkatnya, BPD, masyarakat, dan potensi

desa, juga termasuk pendapatan desa. Hal ini menjadi tugas bagi pemerintah desa dan para pengurus BUMDes untuk menghadapi masalah tersebut. Selain itu, berdasarkan survei awal peneliti ditemukan bahwa BUMDes Superin Jaya sampai saat ini belum memberi manfaat yang signifikan bagi masyarakat maupun terhadap pendapatan asli desa (PADes) Desa Pulau Panjang Cerenti.

Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan prinsip kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) yang termasuk dalam *good corporate governance* adalah ketidakmampuan pengurus BUMDes Superin Jaya dalam memberikan informasi yang setara kepada setiap *stakeholder*. Informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan serta perkembangan BUMDes Superin Jaya saat ini hanya dapat diakses oleh perangkat desa saja atau pihak internal saja, sedangkan masyarakat masih kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai BUMDes Superin Jaya tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) yang termasuk dalam *good corporate governance*.

Sebagai lembaga usaha ekonomi desa milik Pemerintah Desa Pulau Panjang Cerenti, keberadaan BUMDes Superin Jaya seharusnya tidak hanya berfungsi untuk menambah pendapatan asli desa (PADes) Desa Pulau Panjang Cerenti melainkan juga menjadi peluang dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Pulau Panjang Cerenti untuk bekerja di lembaga tersebut. Namun berdasarkan fakta dilapangan diketahui bahwa terdapat karyawan yang bekerja di BUMDes Superin Jaya yang tidak berasal dari Desa Pulau Panjang Cerenti. Menurut hemat peneliti pengurus BUMDes Superin Jaya hendaknya memprioritaskan masyarakat setempat untuk menjadi karyawan di tempat tersebut

sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Desa Pulau Panjang Cerenti serta keberadaan BUMDes Superin Jaya benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Pulau Panjang Cerenti.

Merujuk pada prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dijelaskan diatas yaitu keterbukaan informasi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Dari kelima prinsip tersebut pengelola BUMDes Superin Jaya terlihat belum mampu menerapkan beberapa prinsip tersebut. Sehingga BUMDes Superin Jaya masih dikategorikan belum berkembang.

Dengan memahami kendala-kendala yang dihadapi dan mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip *good corporate governance* diterapkan dalam BUMDes Superin Jaya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan pedoman yang konkrit untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan BUMDes Superin Jaya. Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi di tingkat desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan model pengelolaan BUMDes Superin Jaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan mampu memberdayakan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Macam-macam unit usaha milik BUMDes Pulau Panjang di antaranya yaitu:

1. Foto copy dan percetakan
2. Perlengkapan ATK

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Superin Jaya Desa Pulau Panjang Cerenti 2 tahun

belakangan tidak berlanjar dengan baik dan baru berjalan dengan 1 tahun ini belakangan ini. Kemudian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pulau Panjang Cerenti terjadi permasalahan yaitu terjadinya penunggakan oleh pemanfaat dari unit usaha Perlengkapan ATK yang kurang transparansi sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan dari BUMDes Superin Jaya Desa Pulau Panjang.

Tabel.1.1 Data BUMDes Superin Jaya Desa Pulau Panjang Cerenti Unit Usaha Fotocopy dan Percetakan, dan Pelengkapan ATK.

Keterangan	Modal Awal	Pendapatan		
		2021	2022	2023
Fotocopy, Percetakan, dan Perlengkapan ATK	Rp.150.000.000	Rp.2.141.000	Rp.36.051.000	Rp.6.462.000

Sumber : BUMDes Superin Jaya Pulau Panjang Cerenti

Dapat dilihat dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Kelembagaan BUMDes Superin Jaya di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi mengalami permasalahan dan belum terealisasi dengan baik sehingga dari permasalahan diatas, maka diperlukan suatu penelitian yaitu tentang Berdasarkan uraian diatas, penting untuk mencari tahu dan menganalisis penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan BUMDes Superin Jaya dan faktor-faktor penghambat dalam penerepan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian ini dalam penulisan skripsi dengan judul : **Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan BUMDes.**

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan data pembahasan peneliti serta penjabaran dari masing-masing dimensi teori yang digunakan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan BUMDes Superin Jaya Desa Pulau Panjang Cerenti belum berjalan dengan baik.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan BUMDes Superin Jaya Desa Pulau Panjang Cerenti adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

- 6.2.1 Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Superin Jaya agar dapat aktif dan tegas dalam mengelola usaha BUMDes.
- 6.2.2 Pegurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Superin Jaya disarankan secara optimal menerapkan prinsip-prinsip BUMDes, sehingga masyarakat desa akan benar-benar merasakan manfaat BUMDes dan memaksimalkan badan usaha yang beorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, 2012. *Pengantar Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, 2015. *Teori dan Konsep Administrasi Dari Paradigma Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta: Rajawali.
- Atmosudirjo, 2000. *Administrasi Manajemen Umum*. Jakarta: CV Mas Haji.
- Bungin, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Iskandar, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Kusmayadi, 2015. *Good Corporate Governance (I. Firmansyah (Ed.))*. Siliwangi: LPPM Universitas Siliwangi.
- Meoleong, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Cetakan Ke-36*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3 Terjemahan Rohindi Rohidi*. Jakarta: UI Press.
- Nasrum, 2015. *CORPORATE GOVERNANCE (Konsep, Teori dan Aplikasi di Beberapa Negara Asia)*. Maros: Pustaka Salewangang.
- Nazir, 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, 2020. *Badan Usaha Milik Desa : Pembukuan Keuangan BUMDes*. Jakarta: PT Elex Media Kopmutindo.
- Pasolong, 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Rohman, 2018. *Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa : Menuju Pengelolaan Desa Yang Tertib Dan Akuntabel*. Malang: Intelegensia Media.
- Siagian, 2006. *Filsafat Administrasi. Edisi revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Singarimbun, 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sudarmanto, 2021. *Good Corporate Governance (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, 2016. *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektip UU No. 6/2014*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Surasih, 2002. *Pemerintah Kota* . PT Toko Gunung Agung: Jakarta.
- Sutedi, 2017. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar grafika.
- Syakhroza, 2003. *Best Practices Corporate Governance*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Zarkasyi, 2008. *Good Corporate Governance : Pada Badan Usaha Manufaktur*. Bandung: Alfabeta.